

DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP KINERJA PERTANIAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYESUAIAN HPP GABAH

Ketut Kariyasa

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jln. A. Yani No. 70 Bogor 16161*

PENDAHULUAN

Perubahan yang mengarah pada perbaikan ekonomi sangat diharapkan dari kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun harapan itu belum sepenuhnya bisa dirasakan, bahkan sepanjang tahun 2005, perekonomian Indonesia mengalami jatuh-bangun terutama setelah keputusan pemerintah mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan eskalasi harga-harga umum sangat tinggi dan inflasi hampir mencapai 18 persen (Arifin, 2005). Keputusan kebijakan mencabut subsidi BBM pada bulan Maret menimbulkan tanda tanya besar dan sempat mempengaruhi respon dan sentimen pasar di dalam negeri. Rumah tangga dan dunia usaha atau sektor riil secara umum dengan susah payah melakukan penyesuaian (*adjustment*) yang diperlukan terhadap kebijakan drastis yang telah mendorong kenaikan harga-harga secara umum. Belum genap proses penyesuaian itu terjadi, pemerintah kembali menaikkan harga BBM lebih dari 100 persen.

Kebijakan pengurangan subsidi BBM melalui peningkatan harga BBM telah berdampak pada kinerja semua sektor ekonomi, termasuk sektor pertanian. Di tingkat petani, dampak kenaikan harga BBM ada yang bersifat langsung seperti meningkat biaya operasional karena BBM tersebut langsung sebagai salah satu input produksi (seperti usaha traktor, pompa air, *power thresher*, penggilingan padi), atau bersifat tidak langsung lewat kenaikan biaya transportasi (seperti pupuk dan pestisida) serta ada yang bersifat penyesuaian dengan berubah ongkos atau harga seperti upah tanam disesuaikan dengan perubahan ongkos traktor dan harga barang-barang.

Di sisi lain, sebagai antisipasi dari dampak kebijakan penghapusan subsidi BBM, pemerintah kembali menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang dihasilkan petani dengan harapan agar kegiatan berproduksi padi tetap menarik bagi petani. Melalui Inpres No. 2 Tahun 2005 pemerintah menetapkan HPP gabah kering panen sebesar Rp 1.330/kg. Hasil kajian Simatupang *et al.* (2005) menunjukkan bahwa HPP yang ditetapkan pemerintah sebagai antisipasi dampak kenaikan harga BBM cukup berhasil, terbukti tidak menyebabkan perubahan berarti pada profitabilitas usahatani padi. Dengan kata lain, HPP baru cukup memadai untuk mengkompensasi kenaikan harga, sewa dan upah sarana

maupun prasarana padi akibat kenaikan harga BBM. Kebijakan HPP hanya efektif dalam waktu pendek saja, mengingat pemerintah kembali memberlakukan kebijakan menaikkan harga BBM untuk kedua kalinya. Berkaitan dengan kebijakan terakhir ini, pemerintah kembali mengoreksi kebijakan HPP yang telah ditetapkan dengan Inpres No.13 Tahun 2005 di mana HPP dinaikkan menjadi Rp 1730/kg GKP (Arifin, 2006).

Makalah ini bertujuan untuk melihat dampak kenaikan harga BBM terhadap kinerja sektor pertanian, khususnya kinerja usaha traktor, pompa air, *power thresher*, penggilingan padi dan usahatani padi, serta besarnya HPP yang relevan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Sebagai bahan kajian diambil Sulawesi Selatan sebagai lokasi kasus. Data yang digunakan pada situasi kenaikan harga BBM tahap pertama (Maret 2005), sehingga untuk melihat dampak kenaikan harga BBM tahap kedua (Oktober 2005) serta kemungkinan akan terjadinya kenaikan harga BBM berikutnya dilakukan simulasi pada berbagai perubahan kenaikan harga BBM. Karena hanya mengambil kasus Provinsi Sulawesi Selatan, keterbatasan HPP hasil simulasi ini adalah belum dapat digeneralisir untuk mencerminkan kondisi secara nasional, sehingga dengan pendekatan yang sama masih perlu dikaji pada beberapa wilayah sentra produksi padi.

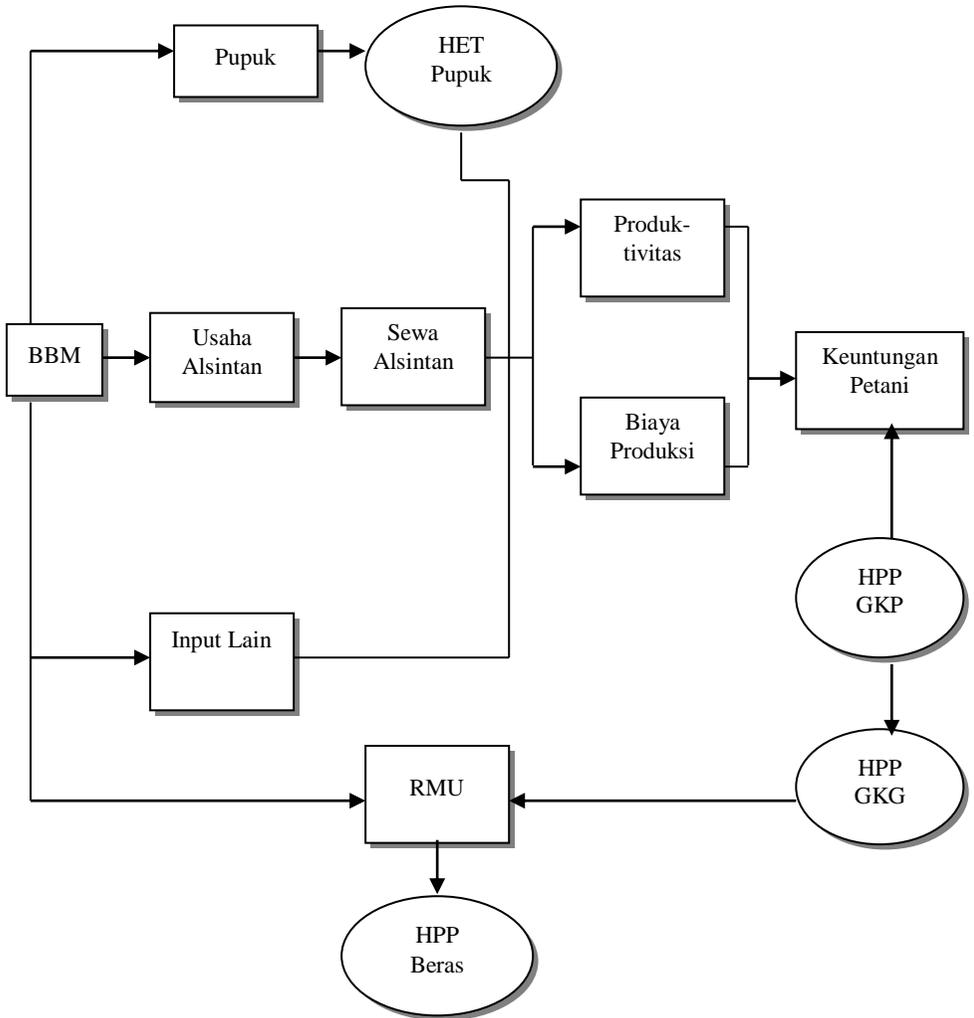
KERANGKA KONSEPTUAL

Kenaikan harga BBM berdampak pada berbagai aspek ekonomi dan kehidupan, baik secara langsung maupun tidak. Demikian halnya pada sektor pertanian, di mana didalamnya termasuk usahatani padi. Kenaikan harga BBM telah berdampak terhadap kinerja semua faktor produksi atau jasa faktor yang digunakan dalam kegiatan usahatani padi.

Kenaikan harga BBM menyebabkan berubahnya kinerja usaha jasa alsintan (traktor, *thresher*, pompa air) yang tercermin dari peningkatan sewa jasa alsintan, biaya operasional dan pemeliharaan, serta berubah pembagian hasil sewa jasa antara pemilik dan operator. Harga eceran tertinggi (HET) pupuk yang ditetapkan pemerintah menjadi semakin tidak efektif karena tambahan biaya transportasi di satu sisi, selain itu usaha ini juga mengalami kenaikan biaya produksi. Input lain, seperti benih, obat-obatan, upah tenaga kerja juga mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan harga BBM. Perubahan kinerja faktor/sewa produksi menyebabkan peningkatan biaya produksi padi di satu sisi, dan di sisi lain berubah produktivitas akibat terjadi perubahan penggunaan faktor produksi, di mana selanjutnya akan menyebabkan turun keuntungan yang diperoleh petani (Gambar 1).

Untuk menjaga agar keuntungan riil petani padi tidak banyak berubah, bahkan kalau bisa meningkat, perlu dilakukan penyesuaian HPP gabah yang

dihasilkan petani. Penyesuaian HPP GKP ini juga harus diikuti penyesuaian HPP GKG. Kinerja RMU (*Rice Milling Unit*) selain dipengaruhi oleh HPP GKP yang ditransmisikan lewat HPP GKG, juga dipengaruhi naiknya harga BBM, dimana kinerja RMU pada akhirnya berkontribusi dalam pembentukan HPP beras yang wajar. Dengan demikian secara jelas terlihat bahwa kenaikan harga BBM akan berdampak terhadap kinerja usaha input dan produksi padi baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk tetap mempertahankan keuntungan yang wajar bagi petani padi, maka harus diikuti dengan adanya kebijakan penyesuaian HPP gabah.



Gambar 1. Mekanisme Pengaruh Kenaikan Harga BBM Terhadap Penyesuaian HPP Gabah

DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM

Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Kinerja Usaha Traktor

Seiring dengan perubahan lingkungan biofisik dan sosial budaya masyarakat serta didukung oleh perkembangan industri alat dan mesin pertanian (alsintan) telah menyebabkan terjadi perubahan secara signifikan dalam penggunaan alsintan di tingkat petani. Perubahan tersebut bisa mengarah kepada perubahan jenis alsintan yang digunakan maupun dalam perubahan jumlah. Traktor merupakan salah satu jenis alsintan yang penggunaannya telah berkembang pesat, termasuk juga di Kabupaten Sidrap-Sulawesi Selatan.

Kepemilikan traktor secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (1) swasta, (2) petani/kelompok tani, dan (3) pemerintah yaitu terutama dinas lingkup Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan (Friyatno *et al.*, 2004). Hasil inventarisasi di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa sebagian besar kepemilikan traktor di kabupaten ini merupakan milik petani (tuan tanah) dan hanya sebagian kecil merupakan milik swasta (usaha jasa sewa traktor). Akibatnya pasar usaha penyewaan traktor di wilayah ini relatif kurang berjalan. Merk traktor yang dimiliki petani cukup beragam, seperti Yanmar, Kubota dan ada juga merk Ratna dengan harga yang cukup beragam pula. Kebanyakan petani memiliki jenis traktor merk Yanmar karena harga relatif lebih murah. Walaupun harga traktor merk Ratna tidak jauh beda dengan Yanmar, namun traktor ini memiliki umur ekonomis lebih pendek. Traktor merk Kubota memiliki harga paling mahal dan umur ekonomis paling panjang. Kemampuan kerja traktor sangat ditentukan oleh spesifikasi teknis tenaga mesin traktor itu sendiri. Traktor dengan PK lebih tinggi tentu mempunyai kemampuan kerja lebih tinggi dibanding traktor dengan PK lebih rendah. Dengan perawatan cukup baik, umur ekonomis traktor diperkirakan bisa mencapai 10 tahun. Dalam sehari (7 - 10 jam) kemampuan mengolah lahan sampai siap tanam berkisar 0,25 – 0,35 hektar. Untuk kelompok traktor yang disewakan, jumlah hari efektif mengolah lahan dalam satu musim kurang lebih 20 hari, sehingga dalam setahun (2 musim padi) luas lahan yang bisa terolah sekitar 10 – 14 hektar.

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM termasuk jenis solar seiring dengan melonjaknya harga komoditas ini di pasar dunia di satu sisi dan disisi lain untuk mengurangi beban anggaran negara yang semakin menipis, telah berdampak terhadap kinerja usaha jasa traktor di Kabupaten Sidrap. Pertanyaannya adalah siapa sajakah yang menanggung dampak tersebut? Apakah seluruhnya ditanggung oleh usaha jasa traktor atau pengguna jasa traktor (petani) atau dibebankan secara adil kepada petani dan usaha jasa traktor?

Pada Tabel 1 disajikan perubahan profitabilitas usaha traktor di Kabupaten Sidrap akibat adanya kenaikan harga BBM. Untuk menghindari kerugian, kenaikan harga BBM telah direspon dengan penyesuaian nilai sewa traktor.

Sebelum kenaikan harga BBM, sewa traktor yang umum berlaku di Sidrap adalah Rp 400.000/ha dan setelah kenaikan menjadi Rp 500.000/ha (meningkat 25%). Secara keseluruhan biaya operasional yang harus dikeluarkan usaha jasa ini mengalami peningkatan sekitar 24,8 persen (Rp 42.027/ha). Kalau diperinci lebih lanjut, biaya BBM jenis solar dan oli yang dikeluarkan usaha jasa ini meningkat masing-masing 27,3 persen dan 22,2 persen, sementara biaya operator meningkat secara proporsional dengan kenaikan sewa traktor, mengingat nilai ongkos operator 20 persen dari nilai sewa traktor.

Tabel 1. Perubahan Profitabilitas per Hektar Usaha Jasa Traktor di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan Sebelum dan Sesudah Kenaikan BBM Maret 2005

Uraian	Satuan	Sebelum Kenaikan BBM				Setelah Kenaikan BBM ^{*)}			
		Vol.	Harga	Nilai (Rp)	Share (%)	Vol.	Harga	Nilai (Rp)	Share (%)
1. Spesifikasi Teknis									
Harga Beli				11 juta				11 juta	
Tenaga Mesin	PK			8,5				8,5	
Umur Ekonomis	Tahun			10				10	
Kemampuan Kerja									
- Jam Operasi	Jam/hari			10				10	
- Luas Pelayanan	Ha/hari			0,33				0,33	
2. Biaya Operasional									
Solar	Liter	21	1.815	38.115	22,5	21	2.310	48.510	23,0 (24,8)
Oli	Liter	0,12	9.900	1.188	0,7	0,12	12.100	1.452	0,7 (27,3)
Perawatan	Rp			21.818	12,9			26.182	12,4 (22,2)
Upah Operator	Rp			80.000	47,2			100.000	47,3 (20,0)
Biaya Bunga	Rp			28.224	16,7			35.229	16,7 (25,0)
3. Penyusutan									
	Rp			100.000				100.000	
4. Total Biaya									
				269.345				311.373	(15,6)
5. Penerimaan									
	Rp			400.000				500.000	(25,0)
6. Keuntungan									
				130.655				188.627	(44,4)
7. RCR									
				1,49				1,61	

Sumber : Data Primer, diolah, Agustus 2005.

Keterangan: *) situasi pada kenaikan BBM tahap pertama

Angka dalam kurung () menunjukkan prosentase kenaikan

Sebelum kenaikan harga BBM, rata-rata keuntungan usaha jasa traktor sekitar Rp 131 ribu/ha pada tingkat RCR 1,49, sedangkan setelah kenaikan harga

BBM menjadi Rp 189 ribu/ha pada tingkat RCR 1,61. Terlihat bahwa setelah kenaikan harga BBM keuntungan yang diterima usaha jasa ini justru lebih baik dari sebelumnya. Fakta ini menunjukkan bahwa tambahan biaya operasional akibat kenaikan harga BBM sepenuhnya ditanggung petani. Fakta ini juga menunjukkan bahwa usaha jasa traktor cenderung terlalu tinggi menaikkan sewa traktor, karena pada sewa yang baru keuntungannya semakin membaik secara nominal, juga terjadi kenaikan relatif lebih tinggi dari kenaikan biaya operasional. Tanpa kebijakan perbaikan harga jual gabah di tingkat petani, maka dapat dipastikan insentif yang diterima petani akan menurun.

Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Kinerja Usaha Pompa Air

Pada usahatani padi sawah irigasi, penggunaan pompa air relatif sangat sedikit, dan itupun umumnya digunakan pada musim tanam padi ke tiga (MT III) dan awal musim tanam padi pertama (MT I) ketika kegiatan pengolahan lahan dilakukan. Selain untuk usahatani padi, penggunaan pompa air juga dilakukan pada usahatani lain, terutama usahatani jagung dan kacang tanah. Penggunaan pompa pada umumnya banyak dilakukan petani di daerah irigasi sedang dan tadah hujan. Tidak seperti traktor, pompa air pada umumnya hanya dimiliki oleh beberapa petani atau kelompok tani tertentu saja. Selain digunakan untuk keperluan sendiri atau kelompok, juga disewakan ke petani yang membutuhkan. Dengan tenaga penggerak 18 PK, pompa air mampu mengairi sekitar 0,33 hektar per hari dengan jam kerja sekitar 10 jam.

Sistem pembayaran untuk jasa pompa air adalah sistem bagi hasil dari hasil kotor. Untuk komoditas padi, jika solarnya ditanggung oleh pemilik pompa pembagiannya adalah 15 persen untuk jasa pompa dan 85 persen untuk petani, sementara untuk palawija 10 persen untuk jasa pompa dan 90 persen untuk petani. Jika solarnya ditanggung petani, pada komoditas padi pembagiannya akan mengalami perubahan menjadi 10 persen untuk jasa pompa dan 90 persen untuk petani, sementara pada komoditas palawija berubah menjadi 5 persen untuk jasa pompa dan 95 persen untuk petani. Sementara biaya untuk operator baik untuk komoditas padi maupun palawija adalah 30 persen dari keuntungan. Konsep keuntungan yang disepakati antara pemilik pompa dan operator adalah nilai selisih antara penerimaan jasa pompa dengan biaya solar dan oli. Komposisi pembagian untuk jasa pompa dan petani atau komposisi untuk upah operator pada semua komoditas tidak mengalami perubahan setelah kenaikan harga BBM.

Sebelum kenaikan harga BBM, untuk mengairi lahan seluas satu hektar rata-rata biaya operasional yang dibutuhkan pada usaha jasa pompa sekitar Rp 323 ribu dan setelah kenaikan harga BBM menjadi Rp 356 ribu atau mengalami peningkatan sekitar 10,03 persen (Tabel 2). Hal yang cukup menarik bahwa walaupun tidak ada perubahan komposisi dalam pembagian upah jasa pompa dan upah operator, ternyata keuntungan yang diperoleh pemilik pompa setelah kenaikan harga BBM relatif lebih baik atau meningkat sebesar 8,73 persen dari Rp

609 ribu/ha menjadi Rp 663 ribu/ha. Tidak ada perubahan dalam komposisi pembagian, sehingga dapat dipastikan bahwa meningkatnya keuntungan yang diperoleh pemilik pompa akibat ada tambahan penerimaan (membaiknya harga gabah) lebih tinggi dari tambahan biaya operasional yang dikeluarkan. Hal ini terjadi karena petani membayar sewa pompa air dalam bentuk gabah setelah panen (yarnen).

Tabel 2. Perubahan Profitabilitas per Hektar Usaha Jasa Pompa Air di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan Sebelum dan Sesudah Kenaikan BBM Maret 2005

Uraian	Satuan	Vol.	Sebelum			Sesudah Kenaikan BBM ^{*)}		
			Harga	Nilai (Rp)	Share (%)	Harga	Nilai (Rp)	Share (%)
1. Spesifikasi Teknis								
Harga Beli				2.500.000			2.500.000	
Tenaga Mesin	PK			18			18	
Umur Ekonomis	Tahun			5			5	
Kemampuan Kerja								
- Jam Operasi	Jam/hari			10			10	
- Luas Pelayanan	Ha/hari			0.33			0.33	
2. Biaya Operasional								
				323.497	100,0		355.929	100,0 (10,0)
Solar	Liter	18,65	1.815	33.846	10,5	2.100	39.161	11,0 (15,7)
Oli	Liter	0,45	9.900	4.431	1,4	12.100	5.415	1,5 (22,2)
Perawatan	Rp			13.846	4,3		16.154	4,5 (16,7)
Upah Operator	Rp			271.374	83,9		295.199	82,9 (8,8)
3. Penyusutan								
	Rp			10.000			10.000	
4. Total Biaya								
	Rp			333.497			365.929	(9,7)
5. Penerimaan								
	Rp			942.857			1.028.571	(9,1)
6. Keuntungan								
	Rp			609.360			662.643	(8,7)
7. RCR								
				2,83			2,81	

Sumber : Data Primer, diolah, Agustus 2005.

Keterangan: ^{*)} situasi pada kenaikan BBM tahap pertama

Angka dalam kurung () menunjukkan prosentase kenaikan

Tidak berubah komposisi pembagian upah jasa pompa dan upah operator juga menunjukkan bahwa kenaikan biaya operasional akibat kenaikan harga BBM seolah-olah tidak dibebankan kepada petani. Kenapa pemilik pompa tidak mengubah komposisi pembagian tersebut? Salah satu jawabannya karena pemilik pompa sudah memprediksi akan terjadi kenaikan harga komoditas pertanian, dan bahkan mereka berpikir tambahan penerimaan akibat kenaikan harga gabah lebih

tinggi dari kenaikan biaya operasional karena kenaikan harga BBM. Jika mereka memprediksi tidak terjadi perubahan harga komoditas pertanian, dapat diduga mereka akan merubah komposisi pembagian, atau jika upah pompa air yang berlaku dalam bentuk uang (bukan bagi hasil) dapat dipastikan mereka juga akan menaikkan sewa pompa. Dengan demikian jika dicermati secara mendalam dampak kenaikan harga BBM sebenarnya dibebankan juga kepada petani oleh usaha jasa pompa lewat harga komoditas padi yang semakin membaik.

Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Kinerja Usaha *Power Thresher*

Penggunaan *thresher* terutama untuk merontok padi tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan varietas unggul baru berumur pendek dan mudah dirontok. Terdapat variasi kegiatan dalam penggunaan *thresher* di Kabupaten Sidrap. Di beberapa lokasi, penggunaan *thresher* menjadi satu kesatuan dengan tenaga kerja panen dan di beberapa lokasi lainnya penggunaan *thresher* tidak menyatu dengan tenaga panen. Dengan tenaga penggerak mesin 6,5 PK, kecepatan merontok padi rata-rata 6 jam per hektar. Dalam setahun luasan tanaman padi yang bisa dirontok berkisar 40 – 60 hektar.

Secara keseluruhan, ongkos jasa *thresher* dan panen (sabit) baik sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM, tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 14,3 persen (1/7) dari produksi padi. Namun dalam pembagian antara tenaga penyabit dan jasa *thresher* terjadi perubahan yaitu sebelum kenaikan harga BBM dari 14,3 persen tersebut, 25 persen untuk jasa *thresher* dan 75 persen tenaga penyabit dan setelah kenaikan harga BBM menjadi 30 persen untuk jasa *thresher* dan 70 persen untuk tenaga penyabit. Ongkos operator yang harus dibayar pemilik *power thresher* juga berubah dari Rp 15000/orang/hari menjadi Rp 20000/orang/hari. Jumlah operator berkisar 8 orang. Selain sebagai operator, mereka juga sekaligus berperan sebagai tenaga penyabit, sehingga penerimaan mereka setelah kenaikan harga BBM sekitar Rp 20000/hari lebih tinggi dari tenaga penyabit.

Perubahan kinerja usaha jasa *power thresher* setelah kenaikan harga BBM disajikan pada Tabel 3. Setelah kenaikan harga BBM, biaya operasional usaha jasa *power thresher* (termasuk biaya tenaga sabit) meningkat sebesar 9,3 persen dari Rp 793 ribu/ha menjadi Rp 867 ribu/ha. Namun demikian, harga komoditas padi yang membaik dan komposisi pembagian untuk tenaga penyabit mengalami perubahan menyebabkan penerimaan dan keuntungan usaha jasa meningkat masing-masing 9,2 persen (Rp 943 ribu/ha menjadi Rp 1028 ribu/ha) dan 8,9 persen (Rp 134 ribu/ha menjadi Rp 146 ribu/ha). Fenomena di atas juga menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM selain dibebankan ke tenaga penyabit (komposisi pembagian berubah) juga secara tidak langsung dibebankan ke petani lewat kenaikan harga gabah (walaupun komposisi pembagian tidak berubah).

Tabel 3. Perubahan Profitabilitas Usaha Jasa *Power Thresher* di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan Sebelum dan Sesudah Kenaikan BBM Maret 2005 (per hektar)

Uraian	Satuan	Vol.	Sebelum			Sesudah Kenaikan BBM ^{*)}		
			Harga	Nilai (Rp)	Share (%)	Harga	Nilai (Rp)	Share (%)
1. Spesifikasi Teknis								
Harga Beli				4.700.000			4.700.000	
Tenaga Mesin	PK			6,5			6,5	
Umur Ekonomis	Tahun			5			5	
Kemampuan Kerja								
- Jam Operasi	Jam/hari			5			5	
- Luas Pelayanan	Ha/hari			1,30			1,30	
2. Biaya Operasional								
				792.849	100,0		866.675	100,0 (9,3)
Solar	Liter	6,25	1.815	11.344	1,4	2,310	14.438	1,7 (27,4)
Oli	Liter	0,23	9.900	2.228	0,3	12,100	2.723	0,3 (22,2)
Perawatan	Rp			25.000	3,2		26.667	3,1 (6,7)
Upah Operator	Rp			754.277	95,1		822.848	94,9 (9,1)
3. Penyusutan								
	Rp			15.667			15.667	
4. Total Biaya								
	Rp			808.515			882.341	(9,1)
5. Penerimaan								
	Rp			942.847			1.028.560	(9,1)
6. Keuntungan								
	Rp			134.331			146.219	(8,8)
7. RCR								
				1,17			1,17	

Sumber : Data Primer, diolah, Agustus 2005.

Keterangan: *) situasi pada kenaikan BBM tahap pertama

Angka dalam kurung () menunjukkan prosentase kenaikan

Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Kinerja Usaha Penggilingan Padi

Selain berpengaruh pada kegiatan produksi padi, kenaikan harga BBM juga berpengaruh terhadap kinerja usaha penggilingan padi (RMU) di Kabupaten Sidrap. Kondisi yang sama juga dialami umumnya oleh RMU di wilayah lain. Kenaikan harga BBM telah merubah pembayaran ongkos giling dalam bentuk natura, sebelum kenaikan harga berlaku dari 12 kg beras yang dihasilkan dari penggilingan dipotong 1 liter untuk jasa penggilingan atau 92,86 persen untuk pemilik beras dan 7,14 persen untuk jasa RMU (1 lt = 0,8 kg). Sementara setelah kenaikan harga BBM dari 10 kg beras yang dihasilkan dari penggilingan dipotong 1 liter untuk jasa penggilingan atau 92,0 persen untuk pemilik beras dan 8,0 persen untuk jasa RMU. Dalam proses penggilingan dari 100 kg GKG dihasilkan 63-64 kg beras, 10 kg dedak/bekatul, 2 kg menir dan lainnya dalam bentuk sekam. Kebanyakan Bekatul/dedak dan menir diambil pemilik beras (petani). Harga dedak di Sidrap berkisar Rp 600-700/kg.

Kenaikan harga BBM menyebabkan biaya operasional usaha jasa RMU meningkat sekitar 16 persen, dari Rp 35/kg GKG menjadi Rp 40,6/kg GKG (Tabel 4). Sementara setelah kenaikan harga BBM, terjadi perubahan sewa penggilingan dan peningkatan harga beras menyebabkan penerimaan dan keuntungan usaha jasa RMU meningkat masing-masing 6,4 persen (Rp 99/kg GKG menjadi Rp 105/kg GKG) dan 1,1 persen (Rp 63,7/kg GKG menjadi 64,4/kg GKG). Fakta ini menunjukkan bahwa kenaikan biaya operasional akibat kenaikan harga BBM sepenuhnya dibebankan ke pengguna jasa RMU (petani) baik melalui perbaikan harga beras maupun melalui perubahan komposisi sewa.

Tabel 4. Perubahan Profitabilitas Usaha Penggilingan Padi per Kuintal Gabah di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan Sebelum dan Sesudah Kenaikan BBM Maret 2005

Uraian	Satuan	Sebelum				Sesudah Kenaikan BBM ^{*)}			
		Volume	Harga	Nilai (Rp)	Share (%)	Volume	Harga	Nilai (Rp)	Share (%)
A. Biaya				3.502	100,0			4.063	100,0
1. Solar	Lt	0,333	1.815	605	10,5	0,333	2.310	770	11,2
2. Oli	Lt	0,028	10.000	278	5,3	0,028	12.000	333	5,3
3. Perawatan				1.389	26,5			1.667	26,6
4. Upah Operator				987	53,0			1.050	53,1
5. Penyusutan				243	4,6			243	3,9
B. Penerimaan	kg beras	4,20	2.350	9.870		4,20	2.500	10.500	(6,4)
Keuntungan				6.368				6.437	(1,1)
RCR				2,82				2,58	

Sumber : Data Primer, diolah, Agustus 2005.

Keterangan: ^{*)} situasi pada kenaikan BBM tahap pertama

Angka dalam kurung () menunjukkan prosentase kenaikan

Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Kinerja Usahatani Padi

Dampak kenaikan harga BBM pada faktor-faktor produksi usahatani padi secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap biaya produksi (Tabel 5). Biaya traktor meningkat sebesar 25 persen (Rp 400 ribu per ha menjadi Rp 500 ribu per ha). Pada waktu yang bersamaan upah tanam juga mengalami peningkatan sekitar 12,5% dari Rp 400 ribu per ha menjadi Rp 450 ribu per ha. Demikian juga harga dan biaya input lainnya seperti obat-obatan, pupuk dan benih meningkat dengan besaran yang bervariasi. Di sisi lain juga terjadi kenaikan harga jual gabah di tingkat petani walaupun di Kabupaten Sidrap masih di bawah HPP yang ditentukan pemerintah saat itu (Rp 1330/kg GKP).

Tabel 5. Perubahan Struktur Biaya dan Penerimaan Usahatani Padi per Hektar di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan Saat Sebelum dan Sesudah Kenaikan Harga BBM 2005

Uraian	Satuan	Sebelum Kenaikan BBM			Sesudah Kenaikan BBM ^{*)}			Kenaikan (%)
		Volume	Harga	Nilai (Rp)	Volume	Harga	Nilai (Rp)	
A. Biaya				3.508.025			3.914.250	11,6
1. Benih	kg	50	3.000	150.000	50	3.500	175.000	16,7
2. Pupuk								
a. Urea	kg	250	1.150	287.500	250	1.200	300.000	4,3
b. SP-36	kg	100	1.500	150.000	100	1.650	165.000	10,0
c. ZA	kg	100	970	97.000	100	1.050	105.000	8,2
3. Pestisida/Obat-obatan								
a. Insektisida Cair	Lt	1.2	62.000	74.400	1.2	70.000	84.000	12,9
b. Fungisida Cair	Lt	0.8	90.000	72.000	0.8	95.000	76.000	5,6
c. Herbisida Cair	Lt	0.5	48.000	24.000	0.5	53.000	26.500	10,4
4. T. Kerja/Traktor								
a. Persiapan Lahan	HOK	4	15.000	60.000	4	20.000	80.000	33,3
b. Traktor				400.000			500.000	25,0
c. Tanam	HOK			400.000			450.000	12,5
d. Pemupukan	HOK	4	15.000	60.000	4	20.000	80.000	33,3
e. Penyemprotan	HOK	4	15.000	60.000	4	20.000	80.000	33,3
f. Penyiangan	HOK	15	15.000	225.000	15	20.000	250.000	11,1
g. Panen								
g.1. Menyabit	HOK	20	15.000	300.000	20	20.000	350.000	16,7
g.2. Power Thresher		892.5	1.250	1.115.625	892.5	1.300	1.160.250	4,0
5. Biaya Lainnya								
a. Pengairan				15.000			15.000	0,0
b. Pajak				17.500			17.500	0,0
B.Penerimaan	Kg	6.230	1.250	7.787.500	6.230	1.300	8.099.000	4,0
Keuntungan				4.279.475			4.184.750	-2,2
RCR				2,22			2,07	-6,8

Sumber : Data Primer, diolah, Agustus 2005.

Keterangan: ^{*)} situasi pada kenaikan BBM tahap pertama

Dampak kenaikan harga BBM menyebabkan keuntungan yang diperoleh petani sedikit menurun, sekitar 2,2% dari Rp 4,28 juta/ha menjadi Rp 4,18 juta/ha. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan harga gabah yang diterima petani belum mampu secara sempurna mengkompensasi kenaikan biaya yang dibebankan

ke petani akibat kenaikan harga BBM. Fenomena di atas juga menunjukkan semakin kuat dugaan bahwa dampak kenaikan harga BBM lebih banyak ditanggung oleh petani, sebaliknya kinerja usaha input produksi dan RMU justru sedikit lebih baik dibanding sebelum kenaikan harga BBM. Hal ini juga sekaligus sebagai bukti bahwa posisi petani, baik sebagai pengguna input produksi maupun sebagai produsen padi cukup lemah. Kalau pembagian dampak kenaikan harga BBM tersebut bisa terdistribusi secara adil di antara usaha input produksi, petani, dan RMU, maka kinerja usahatani padi seharusnya justru sedikit lebih baik dibanding sebelum kenaikan harga BBM, karena harga jual gabah yang diterima petani membaik.

PENYESUAIAN HPP GABAH SEBAGAI KOMPENSASI KENAIKAN BBM

Tujuan utama kebijakan harga dasar gabah yang ditetapkan pemerintah sejak tahun 1969, dimana pendekatan pada mulanya menggunakan Rumus Tani, dengan ketentuan dimana 1 kg padi = 1 kg pupuk Urea (Amang dan Sawit, 2001) dan sekarang menjadi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) adalah untuk menjaga petani bisa menikmati harga yang wajar. Sebagai contoh, untuk mengkompensasi kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga BBM Maret tahun 2005 agar berproduksi padi tetap menarik, pemerintah menetapkan HPP menjadi Rp 1330/kg GKP berdasarkan Inpres No.2 Tahun 2005. Pemerintah kembali mengoreksi kebijakan HPP ketika ada kenaikan harga BBM untuk kedua kalinya dengan menaikkan HPP menjadi Rp 1.730/kg GKP (Inpres No.13 Tahun 2005). Pertanyaannya adalah apakah besar HPP yang ditetapkan pemerintah tersebut sudah cukup untuk mempertahankan keuntungan yang diperoleh petani padi relatif sama dibanding sebelum kenaikan harga BBM? Kalau tidak, berapakah besar HPP yang harus ditetapkan pemerintah? Dengan mengambil contoh Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra produksi padi di Indonesia, serta pasar usaha jasa input produksi dan RMU di Sulsel sudah berjalan cukup baik, maka sangat relevan jika provinsi ini dijadikan salah satu barometer untuk mengoreksi HPP akibat adanya kenaikan harga BBM.

Pada Tabel 6 disajikan besar HPP yang harus ditetapkan pemerintah ketika ada kenaikan harga BBM tahap pertama dan tahap kedua, serta jika nanti terjadi lagi kenaikan harga BBM sampai mencapai 150 persen dan 200 persen terhadap kondisi sebelum kenaikan (sebelum Maret 2005). Mengingat data yang tersedia hanya dua titik (sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM tahap pertama saja), maka data biaya produksi dan penerimaan usahatani padi pada kenaikan harga BBM tahap kedua (kondisi saat ini, ditandai harga solar sebesar Rp 4400/ltr) merupakan hasil simulasi. Dari hasil perhitungan elastisitas titik antara sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM tahap pertama diperoleh elastisitas kenaikan BBM terhadap kenaikan biaya produksi sebesar 0,738. Lebih lanjut, untuk

memprediksi dampak kenaikan harga BBM sebesar 143 persen, serta 200 persen terhadap kenaikan biaya produksi diasumsikan efektifitas elastisitas kenaikan harga BBM terhadap kenaikan biaya produksi hanya sebesar 75 persen. Asumsi ini dilakukan mengingat hasil simulasi yang relatif mendekati realita di lapang pada kenaikan harga BBM tahap kedua (setelah Oktober 2005) pada efektifitas elastisitas berkisar 75 persen.

Tabel 6. Besarnya HPP (Rp/kg GKP) pada Beberapa Alternatif Kenaikan Harga BBM, Kasus Provinsi Sulawesi Selatan

Uraian	Kenaikan Harga BBM (%)			
	0 ¹⁾	16,02 ²⁾	143,09 ³⁾	200,0
Harga Solar (Rp/ltr)	1.810	2.100	4.400	5.430
Penerimaan	7.787.500	8.689.283	13.950.664	16.407.975
Biaya	3.508.025	3.914.250	6.284.337	7.390.980
Keuntungan	4.279.475	4.775.033	7.666.327	9.016.995
RCR	2,22	2,22	2,22	2,22
HPP (Rp/Kg GKP)	1.250 ⁴⁾	1.395	2.239	2.634

Keterangan: ¹⁾ kondisi sebelum kenaikan harga BBM
²⁾ kondisi setelah kenaikan harga BBM tahap pertama
³⁾ kondisi setelah kenaikan harga BBM tahap kedua
⁴⁾ harga GKP di tingkat petani

Terlihat bahwa untuk tetap mempertahankan rasio antara penerimaan dengan biaya (RCR = 2,2) yang diterima petani, maka ketika terjadi kenaikan harga BBM sebesar 16 persen besar HPP yang harus ditetapkan pemerintah minimal sebesar Rp 1.395/kg GKP, sementara pada waktu itu besar HPP yang ditetapkan pemerintah hanya sebesar Rp 1.330/kg GKP. Dengan demikian, besar HPP yang ditetapkan pemerintah saat itu masih lebih rendah dari seharusnya. Untuk mengimbangi kenaikan harga BBM tahap kedua agar berproduksi padi tetap menarik, maka besar HPP yang harus ditetapkan pemerintah sebesar Rp 2.339/kg GKP. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa HPP yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 1.730/kg GKP sejak Oktober 2005 (Inpres No. 13 tahun 2005) dan masih berlaku sampai kini tidak layak untuk mengkompensasi dampak kenaikan harga BBM tahap kedua. HPP yang ditetapkan pemerintah sebesar itu akan menyebabkan semakin tidak menariknya berproduksi padi. Kondisi ini akan diperparah lagi dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan impor beras karena alasan untuk mempertahankan stok beras yang wajar.

Jika pemerintah nanti kembali menaikkan harga BBM sekitar 200 persen (harga solar menjadi Rp 5.430/ltr), maka besar HPP yang layak ditetapkan pemerintah agar berusaha padi tetap menarik bagi petani paling tidak sebesar Rp 2.634/kg GKP dan itupun dengan asumsi HPP tersebut efektif sampai di petani.

PENUTUP

Kebijakan penghapusan subsidi BBM secara berulang-ulang pada tahun 2005 (Maret dan Oktober) yang ditandai dengan melambungannya harga BBM secara tajam berdampak terhadap perubahan kinerja pada semua aspek ekonomi, termasuk sektor pertanian. Pada sektor pertanian, khususnya usahatani padi, dampak kenaikan harga BBM ternyata sedikit membawa perbaikan pada kinerja usaha jasa input produksi (traktor, pompa air, *power trresher*) dan usaha penggilingan padi (RMU), sebaliknya menyebabkan menurunnya profitabilitas berproduksi padi walaupun di sisi lain terjadi kenaikan harga gabah. Fenomena ini menunjukkan bahwa kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga BBM yang dialami oleh masing-masing usaha jasa input produksi sepenuhnya dibebankan ke petani dengan cara menaikkan sewa jasa alsintan. Tidak hanya semua tambahan kenaikan biaya produksi yang dibebankan ke petani, malahan juga usaha alsintan telah mengambil bagian pendapatan petani dengan menaikkan sewa yang terlalu tinggi dari sekedar untuk mempertahankan keuntungan yang sama.

Hasil kajian di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap gabah yang ditetapkan melalui Inpres No.2 Tahun 2005 (Rp 1.330/kg GKP) belum layak untuk mempertahankan keuntungan relatif yang diterima petani Sulsel. Demikian juga dengan HPP yang sedang berjalan saat ini (Rp 1.730/kg GKP melalui Inpres No.13 tahun 2005) diduga juga akan tidak mampu mengkompensasi kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga BBM tahap kedua untuk mempertahankan keuntungan relatif yang diperoleh petani. Dengan melihat fenomena yang terjadi di Sulawesi Selatan, pemerintah memang sebaiknya segera mengoreksi HPP yang sedang berjalan saat ini. Sebagai contoh untuk kasus Sulsel HPP yang relevan ditetapkan pemerintah paling tidak sebesar Rp 2.239/kg GKP. Memang kasus Sulsel tidak bisa digeneralisir secara nasional, akan tetapi lebih mengingatkan pentingnya pemerintah untuk segera mengoreksi kebijakan HPP yang berlaku sedang berjalan saat ini. Beranjak dari fenomena di Sulsel, dengan pendekatan yang sama pada beberapa wilayah sentra produksi padi akan bisa ditentukan besar HPP nasional yang relevan saat ini. HPP ini pun terus harus dikoreksi jika kembali terjadi kenaikan harga BBM, karena fakta menunjukkan dampak kenaikan harga BBM lebih banyak dibebankan pada petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Amang B. dan M.H. Sawit. Kebijakan Beras dan Pangan Nasional: Pelajaran dari Orde Baru dan Orde Reformasi. IPB Press. Bogor.
- Arifin. B. 2005. Prospek Ekonomi 2006: Tonggak Pemulihan Sektor Riil. *Economic Review Journal*, No. 22, Desember 2005.

- Arifin. B. 2006. Analisa Ekonomi. <http://kompas.com/kompas-cetak/0602/13/utama/2436348.htm>.
- Friyatno S., Handewi P.S., B. Rachman dan Supriyati. 2004. Kelembagaan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan). Prosiding Efisiensi dan Daya Saing Sistem Usahatani Beberapa Komoditas Pertanian di Lahan Sawah.
- Simatupang P., S. Mardianto, K. Kariyasa dan M. Maulana. 2005. Evaluasi Pelaksanaan dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) GabahTahun 2005 dan Perspektif Penyesuaian Tahun 2006. Analisis Kebijakan Pertanian (AKP) Volume 3 Nomor 3, September 2005.